



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TIM ADVISOR PELAKSANA *PROBITY ADVICE* PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH


DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan advokasi kepada seluruh stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel maka perlu dilakukan advokasi yang menerapkan prinsip *probity advice*;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Advisor;
  - c. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ADVISOR PELAKSANA PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- PERTAMA : Menetapkan Tim Advisor Pelaksana *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diangkat sebagai Tim Advisor Pelaksana *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Juni 2017  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan;
4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
HUKUM DAN PENYELSAIAN  
SANGGAH LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR: TAHUN 2017  
TENTANG TIM ADVISOR  
PELAKSANA *PROBITY ADVICE*  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No	Nama	Instansi/Lembaga/Badan Usaha	Keterangan
1	A. Wahid Saraha	Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore	
2	Abdul Haris	Pemerintah Provinsi Aceh	
3	Abdul Kadir	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	
4	Abu Sopian	Balai Diklat Keuangan Palembang	
5	Achmad Karsono	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	
6	Achmad Zikrullah	Kementerian Keuangan	
7	Ade Kristiawan	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	
8	Ade Rizky Emirsyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
9	Ahmad Feri Tanjung	Universitas Prima Indonesia	
10	Albert Pramono Soesanto	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	
11	Anderson	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	
12	Andi Hamzah Mahmud	Dinas KP3K Kota Bau-Bau	
13	Andi Muhammad Arpan	Balai Diklat Provinsi Kalimantan Timur	
14	Anwar Subianto	Dinas Bina Marga SDAESDM Kota Cilacap	
15	Anwar Syam	ULP Institut Pertanian Bogor	
16	Arif Budiman	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
17	Arthur Halik Razak	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
18	Bambang Widiyanto	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	

No	Nama	Instansi/Lembaga/Badan Usaha	Keterangan
19	Benny Mansjur	Pemerintah Kabupaten Enrekang	
20	Budi Setyono	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	
21	Carles M. Simamora	Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung	
22	Davli	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	
23	Eben Henry Reagen	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
24	Edi Tamtomo	Pusat Pendidikan dan Latihan BPK RI	
25	Endra Mayendra	LPJK Kepulauan Riau	
26	Fahrurrazi	Dinas Perhubungan Kota Sukabumi	
27	Gusti Noviar Kusuma	ULP Kabupaten Tanah Laut	
28	Harry Sri Kahartan K. W.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
29	Heldi Yudiatna	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
30	Hendra D. Numberi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
31	Heryanto Sijabat	Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran dan Perbendaharaan	
32	Indra Gunawan	LPBJ Kabupaten Ogan Komering Ilir	
33	Indro Bawono	Kementerian Keuangan	
34	Irawaty Imran	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
35	Isriadi Putranto	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar	
36	Jufri Antoni	Dinas P2KUKMP Kabupaten Mandailing Natal	
37	Khalid Mustafa	Konsultan Pengadaan	
38	Linggar L. Inhardy	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
39	Lintong Janji N. Sinambela	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
40	M. Andhika Rangga L	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
41	Mahaputera	Universitas Negeri Jakarta	

No	Nama	Instansi/Lembaga/Badan Usaha	Keterangan
42	Mandar Trisno H.	KPPN Sijunjung	
43	Mudjisantosa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
44	Muhammad Fajuri	ULP Kabupaten Tangerang	
45	Muhammad Firdaus	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
46	Nosin	Lembaga Administrasi Negara	
47	Nurlisa Afriani	Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Perdagangan	
48	Ranto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
49	Ronald Hasudungan Sianturi	Universitas Prima Indonesia	
50	Rusli Maryadi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
51	Samsul	Pemerintah Kabupaten Banjar	
52	Sari Melani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
53	Selamet Budiharto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
54	Slamet Sudaryo	Pusat Kebijakan dan Studi Kebijakan Publik Jambi	
55	Wakhyudi	Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP	
56	Wildan Massani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
57	Wisnu Setyo Wijoyo	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
58	Yasip Khasani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	